

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *podcast* Bocor Alus Politik yang diproduksi oleh Tempo berhasil menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan secara efektif selama pemerintahan Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Efektivitas ini terlihat dari daya jangkau, kualitas konten, serta reaksi yang ditimbulkan dari publik maupun aktor negara terhadap isu-isu yang diangkat.

Berdasarkan temuan penelitian, episode yang memiliki pengaruh paling besar adalah **“Skandal di Mahkamah Konstitusi dan Manuver Jokowi untuk Gibran”** yang turut mendorong pemberian sanksi terhadap Hakim MK Anwar Usman. Episode ini menunjukkan dampak konkret terhadap perubahan kebijakan, sekaligus menimbulkan reaksi keras dari pemerintah.

Selanjutnya, pengawasan dengan dampak sedang terlihat dalam episode **“Ambisi dan Manuver Iriana Jokowi Menjadikan Gibran Cawapres Prabowo”** dan **“Nilai Rocky Gerung untuk 10 Tahun Jokowi”**, yang masing-masing menarik perhatian jutaan penonton dan memicu diskusi publik luas. Meski tidak menghasilkan perubahan kebijakan langsung, episode-episode ini menggugah kesadaran politik masyarakat dan memperkuat tekanan moral terhadap kekuasaan.

Adapun pengawasan dengan efek yang lebih rendah, meskipun tetap signifikan, tercermin dalam episode **“Operasi Partai Pro Jokowi Menjegal Anies Baswedan”** dan **“Pesan Pandji untuk Presiden dan Dinasti Politik Jokowi”**. Episode ini tidak memicu respons langsung dari pemerintah, tetapi tetap berperan dalam membangun opini kritis publik.

Dalam kerangka teori *Monitory Democracy* dari John Keane,

100

Zulvian Ramadhan Putra, 2025

*ANALISIS PERAN PENGAWASAN PODCAST “BOCOR ALUS POLITIK” TEMPO
DALAM KERANGKA MONITORY DEMOCRACY PADA MASA PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

keberhasilan *podcast* ini dianalisis melalui empat aspek: jangkauan audiens yang luas, kualitas konten yang berbasis *muckraking journalism*, prinsip *abundance of communication* yang menjaga konsistensi pengawasan, serta dampak politik yang nyata. Teori ini menunjukkan bahwa pengawasan kekuasaan tidak lagi hanya dilakukan oleh lembaga formal negara, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif oleh media independen dan masyarakat sipil melalui saluran digital.

Dari keseluruhan temuan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Bocor Alus Politik bukan hanya menjadi ruang diskursus publik, tetapi juga telah bertransformasi menjadi aktor pengawas kekuasaan yang relevan dan berpengaruh di tengah kemunduran institusi demokrasi formal. Peran ini mencerminkan lahirnya bentuk-bentuk baru pengawasan di era digital, sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem media independen sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, Bocor Alus Politik disarankan untuk terus menjaga konsistensi penerbitan konten dan memperluas cakupan topik yang diangkat, termasuk isu-isu lokal, kebijakan minoritas, dan perkembangan demokrasi digital agar semakin menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, *podcast* ini dapat mengembangkan kanal partisipatif publik seperti forum diskusi, jajak pendapat, atau sesi interaktif untuk memperkuat praktik pengawasan kekuasaan secara kolaboratif. Untuk memperluas resonansi dan pengaruhnya, Bocor Alus Politik juga dapat mempertimbangkan distribusi lintas platform (seperti YouTube Shorts, Instagram Reels, dan TikTok) serta menjalin aliansi strategis dengan komunitas, akademisi, dan media alternatif. Mengingat adanya ancaman terhadap tim produksi, penting pula bagi *podcast* ini untuk memperkuat sistem keamanan digital, perlindungan hukum, serta membangun jaringan

101

solidaritas dengan organisasi jurnalis dan lembaga masyarakat sipil guna menjamin keberlanjutan fungsi kontrol kekuasaan yang mereka jalankan.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan kekuasaan melalui media baru seperti podcast dapat dianalisis secara efektif melalui pendekatan *Monitory Democracy* yang dikembangkan oleh John Keane. Oleh karena itu, secara teoritis, studi ini menyarankan perlunya pengembangan kajian mengenai bentuk-bentuk pengawasan kekuasaan non-elektoral yang muncul dalam ekosistem digital, khususnya pada medium berbasis audio seperti podcast. Teori *Monitory Democracy* juga dapat diperkaya dengan memperhatikan dinamika audiens digital, partisipasi deliberatif online, serta dampak nyata dari tekanan sosial-politik yang ditimbulkan oleh produksi konten kritis. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana variabel algoritma media sosial, segmentasi audiens, dan ekosistem digital memengaruhi efektivitas lembaga pengawas non-konvensional dalam menekan dan membentuk akuntabilitas kekuasaan. Dengan demikian, teori *Monitory Democracy* dapat terus direlevansikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan lanskap demokrasi kontemporer.